

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY
TAHUN 2005-2009**

SKRIPSI :



Disusun Oleh :

Nama : Maria Yunita Bau
Nomor Mahasiswa : 143102002
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Jurusan : Ilmu Ekonomi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2011**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI DIY TAHUN
2005-2009
INTISARI**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan di suatu daerah. Komponen dari IPM adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Propinsi DIY dan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda model *log linier*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga meningkat, dan hasil regresi berganda juga menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY akan tetap atau konstan.

***Kata kunci :* Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia.**

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi, dan dapat menambah dana alokasi umum, belanja modal dan kualitas pembangunan manusia pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Otonomi Daerah adalah kewenangan setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu dimana berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (Suparmoko, 2002:18).

Kuncoro (2007) juga menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPPI).

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) terdapat 3 indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu: lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan

pemerintah. Perbaikan pengalokasian dana untuk belanja modal selain belanja rutin ikut menopang perbaikan kesejahteraan. Menurut United Nation Development Program (UNDP, 1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi bersifat timbal balik, artinya apabila terdapat pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusianya.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAU yang diterima untuk kepentingan belanja modal dan bagaimana dampak alokasi belanja ini terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia tingkat Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul **”Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2005-2009”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia (Suyanto dalam Christy, dkk., 2009). Pembangunan harus memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, baik menyangkut pemenuhan kebutuhan fisik maupun non fisik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

IPM mulai digunakan oleh United Nation Development Program (UNDP) sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan

indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

IPM merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa (dengan timbangan dua pertiga) serta rata-rata tahun bersekolah (timbangan : satu pertiga), standar hidup layak (*standard of living*) yang diukur oleh PDB per kapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) (www.cifor.cgiar.org).

2.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum suatu daerah merupakan kebutuhan daerah dikurangi dengan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan. Kemampuan daerah untuk melakukan penghitungan DAU yang menjadi bagiannya, akan mempercepat dalam penyusunan APBD tanpa menunggu terbitnya Kepres tentang pembagian APBD tersebut.

Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh bagian DAU yang relatif kecil, demikian pula sebaliknya. DAU dapat dikategorikan sebagai *Unconditional Grant* yakni transfer tak bersyarat dan juga sebagai *blok grant* yaitu jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu.

2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordian, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

2.1.4. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah "makhluk organik" yang bergerak efisien mengatasi tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkelebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan (Rondinelli dan Cheema dalam Sarundajang (1999)).

3.1. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder model *data pooling time series*, yaitu data yang merupakan gabungan dari data runtut waktu dan *cross section* yang diperoleh dari propinsi DIY dalam angka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi DIY. Data tersebut meliputi data mengenai Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber data lainnya diperoleh dari laporan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Propinsi DIY yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi DIY dengan rentang waktu dari Tahun 2005-2009.

3.1.2. Definisi Operasional Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan *Human Development Index* (HDI). IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. Dalam penelitian ini satuan data IPM adalah dalam persen. Semakin tinggi angka Indeks Pembangunan Manusia, maka kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup akan semakin baik.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) atau *General Allocation Fund* merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dalam penelitian ini satuan data DAU adalah dalam juta rupiah.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2006). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dalam penelitian ini satuan Belanja Modal adalah dalam juta rupiah.

3.2. Metode Analisis Data

Model empirik tersebut adalah model estimasi untuk data panel. Penerapan dalam penelitian ini dilakukan untuk daerah Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Adapun penulisan model empirik berdasarkan kategori data panel adalah (Gujarati, 1999:99)

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{it} + u_{it}$$

Dimana :

Y = Variabel Dependen

X = Variabel Independen

α_0 = Variabel Konstan atau Konstan

t = Periode Waktu

u = Variabel Gangguan (*disturbance term*)

Persamaan di atas adalah bentuk model dasar untuk analisis empirik dengan menggunakan data panel untuk keperluan analisis dengan menggunakan regresi linier berganda model *log linier* dengan tujuan untuk menyamakan satuan data, memperkecil variasi data, menghindari penyakit multikolinearitas, dan memperbaiki hasil regresi, maka model estimasinya dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln X_{1it} + \alpha_2 \ln X_{2it} + u_{it}$$

Dimana :

Y : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (persen)

X₁ : Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (juta rupiah)

X₂ : Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (juta rupiah)

α_0 : Konstanta

α_1, α_2 : Koefisien Regresi berganda

u_t : Variabel Gangguan

t : Periode Waktu (tahun)

i : Daerah

Ln : Logaritma Natural (persen)

4.1. Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Pemilihan model dalam penelitian ini menggunakan uji Hausman untuk memilih model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Berikut ini tabel hasil uji Hausman :

Tabel 4.1
Hasil Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Model	Hausman Test	Chi Square. tabel	Keterangan	Hasil Pemilihan Model
$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_{1it} + \alpha_2 \text{Ln}X_{2it} + u_{it}$	0,005914	5,991	Nilai Hausman test < dari nilai Chi Square _{-tabel}	<i>Random Effect</i>

Sumber: Lampiran Hasil Olah Data Uji Hausman, 2011.

Dari tabel hasil uji Hausman untuk pemilihan model persamaan :

$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln}X_{1it} + \alpha_2 \text{Ln}X_{2it} + u_{it}$ di atas menunjukkan bahwa nilai Hausman test < dari nilai Chi Square_{-tabel}, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang baik untuk diestimasi adalah *Random Effect*.

4.2. Hasil Estimasi Model *Random Effect*

Analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier dengan data *pooling time series*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) (X_1) dan Belanja Modal (BM) (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer *Eviews 4.1* diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Estimasi Model *Random Effect* Metode GLS

Variabel	Koefisien Regresi	Standart Error	t-statistik	Probabilita
Konstanta	46,00936	5,707469	8,061254	0,0000
LnX ₁	2,258685	0,388328	5,816436	0,0000
LnX ₂	0,090634	0,115433	0,785164	0,4407
R² : 0,982				
Adjusted R² : 0,980				
DW-test : 1,448				
N : 25				

Sumber : Lampiran Hasil Olah Data Model *Random Effect*, 2011.

Secara matematis hasil dari analisis regresi linier berganda dapat ditulis pada estimasi persamaan sebagai berikut :

$$Y_{it} = 46,00936 + 2,258685LnX_{1it} + 0,090634LnX_{2it} + u_{it}$$

se	(5,707469)	(0,388328)	(0,115433)
t	(8,061254)	(5,816436)	(0,789164)
R²	0,9817		

Pada persamaan di atas ditunjukkan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun arti dari koefisien regresi tersebut adalah:

1. $\alpha_0 = 46,00936$

Variabel lain dianggap tetap, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) nilainya sebesar 46,00936 persen selama periode 2005-2009.

2. $\alpha_1 = 2,258685$

Artinya apabila variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan 1 persen Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X₁), nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) sebesar 2,258685 persen.

3. $\alpha_2 = 0,090634$

Artinya apabila variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan 1 persen Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X₂), nilai Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) sebesar 0,090634 persen.

4.3. Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel yang lain tetap atau konstan.

a. Pengujian pengaruh variabel Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_1) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y)

$$- \beta_1 = 2,258685$$

Artinya apabila variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan 1 persen Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_1), akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) sebesar 2,258685 persen.

-Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05, pengujian satu sisi dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yaitu : $df = (n-k) = (25 - 3) = 22$, diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1,717$ dan dari hasil regresi berganda diperoleh $t_{\text{statistik}} = 5,816$.

-Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 5,816 > t_{\text{tabel}} 1,717$, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh secara positif dan signifikan variabel Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y). Hal ini berarti, jika Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga meningkat.

b. Pengujian pengaruh variabel Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_2) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y).

$$- \beta_2 = 0,090634$$

Artinya apabila variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*), maka setiap kenaikan 1 persen, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) sebesar 0,090634 persen.

-Dengan taraf nyata (α) = 5% = 0,05, pengujian satu sisi dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) yaitu : $df = (n-k) = (25 - 3) = 22$, diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1,717$ dan dari hasil regresi berganda diperoleh $t_{\text{statistik}} = 0,785$.

-Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai $t_{\text{statistik}} = 0,785 < t_{\text{tabel}} 1,717$, maka disimpulkan bahwa ada pengaruh secara positif, tetapi tidak signifikan variabel Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y). Hal ini berarti, jika Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY akan tetap atau konstan.

4.4. R^2 (Koefisien Determinasi)

R^2 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari regresi dengan metode OLS diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,984 artinya variasi dari variabel dependen (Y) dalam model yaitu variabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (Y) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (X) yaitu Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_1) dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY (X_2) sebesar 98,4 persen, sedangkan sisanya sebesar 2,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.5. Pembahasan

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga meningkat. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY akan tetap atau konstan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang “Pengaruh antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY Tahun 2005-2009, maka diperoleh kesimpulan dan saran diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY juga meningkat. Karena dengan pengelolaan sumber daya dan juga bantuan dari pemerintah yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU),

maka alokasi dana untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan juga akan semakin baik.

2. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY. Hal ini berarti, jika Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat, maka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY akan tetap atau konstan. Hal ini karena pengalokasian dana bagi Belanja Modal yang seharusnya untuk peningkatan kesejahteraan tetapi hanya digunakan untuk pemeliharaan gedung perkantoran, peralatan, dan kendaraan bermotor. Seharusnya dana tersebut untuk gedung sekolah, peralatan pelajaran, dan juga sarana kesehatan.

5.2. Saran

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY sehubungan dengan adanya pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Propinsi DIY, maka disarankan Pemerintah Kabupaten di Propinsi DIY meningkatkan pengeluaran pembangunan, investasi daerah, dengan cara :

1. Pemerintah Kabupaten di Propinsi DIY sebaiknya mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY melalui investasi daerah. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mendorong pertumbuhan sisi pendidikan, kesehatan, maupun taraf hidup, pendapatan, lapangan pekerjaan dan pada akhirnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY meningkat.
2. Saran lain dapat juga dengan implementasi otonomi daerah yang terkait dengan pengeluaran pembangunan dalam semua sektor baik sektor properti, pertanian, niaga dan lain-lain akan mampu mempengaruhi peningkatan lapangan pekerjaan, pendapatan dan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya pengeluaran pembangunan, maka akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi DIY.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4, Yogyakarta : Aditya Media.
- Badan Pusat Statistik, 2005-2009, *DIY dalam Angka*, BPS DIY.
- Bland, Robert L. and Samuel Nunn, 1992, *The Impact of Capital Spending on Municipal Operating Budgets*. Public Budgeting & Finance. Vol. 12, No. 2: 32-47.
- Christy, Fhino Andrea dan Adi, Prito Hari, 2009, “Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia”, *The 3rd National Conference UKWMS Page*, UKMSW, Salatiga.
- Dewi, Adha, 2006, *Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Gevisioner, 2004, *Badan Litbang Riau Pekanbaru*.
- Gujarati, D., 1999, *Basic of Econometrics*, 1st edition, Singapore: Mc.Graw Hill Inc.
_____, 2003, *Essentials of Econometrics*, 2nd edition, Singapore: Mc.Graw Hill Inc.
- Greene, H. William, 2000, *Econometric Analysis*, Third Edition, New Jersey: Prentice Hall
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Hsiao, Cheng, 1995, *Analysis of Panel Data*, Cambridge : Cambridge University Press.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Haryo, 2007, *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Prawirosetoto, Yuwonono, 2002, Desentralisasi Fiskal di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 Agustus, Jakarta : Unika Atmajaya.
- Prakoso, Kesit Bamabng, 2004, Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY), *Jurnal JAAI*, Vol. 8, UII, Yogyakarta.
- Rosady Ruslan, 2004, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Saragih, Panglima Juli, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simanjuntak, Robert, 2001, *Kebijakan Pungutan Daerah di Era Otonomi, Domestic Trade, Decentralization and Globalization: A One Day Conference*. LPEM-UI. Jakarta.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Syaiful, 2008, *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Todaro, Michael. P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Terjemahan, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta.
- UNDP, 1996, *Human Development Report*, Oxford University Press, New York.
- UNDP, 2004, *Human Development Report*, Oxford University Press, New York.
- Widarjono, Agus, 2005, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Ekonisia, UII, Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

INFORMASI PERSONAL

Nama : Maria Yunita Bau
Umur : 26 tahun
Tempat Tanggal Lahir : Atambua, 05 Juni 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Gorongan 111, No. 215 A, Gorongan, Sleman- Condong Catur
Hand Phone : 081392080359

Pendidikan Formal

SDI Debubot (1991-1997)

SMP Negeri 1 Atambua (1997-2000)

SMU Negeri 1 Atambua (2000-2003)

Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Yogyakarta (2003-2012)

Yogyakarta, 09 Januari 2012

Maria Yunita Bau